

**PELAKSANAAN GRADUASI MANDIRI KELUARGA
PENERIMA MANFAAT DARI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN
(Studi Pada Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari)**

Sri Andini Wa Ode¹⁾, Peribadi²⁾, Nada Kusuma³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
Email: sriandiniwaode@gmail.com, citaperibadi@gmail.com, nadatamrin@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan adalah situasi di mana satu orang atau satu rumah tangga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, lingkungan sekitar orang didik memberi mereka motivasi untuk meningkatkan kekuatan mereka, atau setidaknya sebagian besar ketahanan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan program Keluarga Penerima Manfaat untuk Swakelola Keluarga Harapan di komunitas Lepo-Lepo Baruga, serta faktor-faktor lain yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan asumsi minimum dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses pemeringkatan dengan berbagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan Graduasi Mandiri Keluarga Harapan di Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari didasarkan pada beberapa indikator, antara lain: derajat mobilitas, kemampuan membeli komoditas skala kecil dan besar, dominasi terhadap kelompok, keadaan hukum dan politik, derajat keterlibatan dalam bentuk kampanye dan perlindungan, sumbangan ekonomi, dan dampak negatif terhadap kelompok. Sebaliknya, korelasi positif terlihat antara beberapa faktor seperti kontrol sosial, ketajaman bisnis, depresi material, dan pertumbuhan individu dan Keluarga Penerima Manfaat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Graduasi Mandiri, Program Keluarga Harapan

ABSTRACT

Poverty is a situation in which an individual or household struggles to meet basic needs. However, the surrounding environment often provides motivation for individuals to strengthen their resilience, at least to some extent. The aim of this study is to understand the implementation of the Family Beneficiary Program for the Independent Management of the Family Hope Program in the Lepo-Lepo Baruga community, as well as other influencing factors. This study employs a qualitative descriptive method, assuming that it can be used to describe and explain the ranking process through various case studies. The results show that the implementation of the Independent Graduation of the Family Hope Program in Lepo-Lepo, Baruga District, Kendari City, is based on several indicators, including mobility levels, purchasing power for small- and large-scale commodities, dominance within groups, legal and political conditions, involvement in campaigns and protection, economic contributions, and negative impacts on groups. Conversely, a positive correlation is observed between several factors, such as social control, business acumen, material deprivation, and the growth of individuals and Family Beneficiary Program participants.

Keywords: Implementation, Independent Graduation, Family Hope Program

PENDAHULUAN

Pemerintah menggunakan strategi kebijakan perlindungan sosial komprehensif untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan pendapatan orang rentan. Komite ini merupakan bagian dari Rencana Jangka Menengah Tahunan Nasional 2020–2024. Pemahaman sosial dimaksudkan untuk membantu masyarakat Indonesia mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan mampu mengelola secara finansial segala risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi. Jaminan sosial yang komprehensif dilaksanakan melalui integrasi banyak program yang menyediakan penitipan anak yang aman dan efektif (Kemensos, 2020).

Menurut Midgley (1995), kecemasan sosial didefinisikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang tercermin dalam tiga elemen: tingkat penyelesaian masalah sosial, tingkat pemenuhan kebutuhan, dan tingkat keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Salah satu jenis program perlindungan sosial yang digunakan oleh banyak negara berkembang dikenal sebagai Bantuan Tunai Bersyarat (CCT).

Lebih jauh, dalam konteks Indonesia, program CCT telah mengadopsi dan memodifikasi pelatihan implementasi CCT di beberapa negara; dengan demikian, sejak 2007, Program Keluarga Harapan telah dilaksanakan. Berbagai penelitian, termasuk yang dilakukan oleh PKH (2016), Smeru (2019), dan Microsave Consulting (2019), menyoroti dampak positifnya. Akibatnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH selalu dibutuhkan, dan indeks kesejahteraan sosial terus menurun. Dengan tujuan mengurangi kemiskinan menjadi 6,5–7,0% pada tahun 2024, 1 juta KPM adalah tujuan yang dapat dicapai secara langsung pada tahun 2020, atau 10% dari total penerimaan PKH.

Menurut Khoiriyah (2019), kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang harus terus dibicarakan secara tidak memihak guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Beredarnya isu pelaksanaan program PKH sebagaimana disebutkan dalam Permensos RI Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang erat kaitannya dengan PKH. “Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat

yang terslibat dalam penyelenggaraan sosial,” demikian bunyi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembangunan Sosial. Sebagai bagian dari Program Percepatan Kemiskinan Penanggulangan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH sejak tahun 2007.

Kemiskinan merupakan fenomena yang hampir dialami oleh setiap orang di masyarakat dan bangsa. Fenomena ini sering dialami oleh masyarakat baik besar maupun kecil, khususnya di seluruh Indonesia. Kemiskinan merupakan situasi di mana seseorang atau sekelompok orang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, meskipun lingkungan terdekat orang tersebut memberikan kesempatan untuk meningkatkan tingkat kerjasamanya atau menghindari konflik. (Meri, 2023)

Kontrak sosial yang dilandasi oleh saling pengertian erat kaitannya dengan inisiasi dan kepatuhan terhadap kontrak tersebut di atas. Kelompok penerima manfaat minimal adalah menyediakan fasilitas kesehatan sesuai protokol kesehatan bagi perempuan dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Selain itu, minimal 85% siswa SMA negeri wajib mengikuti kegiatan pendidikan yang memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Selain itu, siswa wajib mengikuti kegiatan terkait layanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya yang berusia minimal 60 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat. Penelitian tentang PKH penting dilakukan untuk menekan kemiskinan dari kelompok titik terendah. Hal ini pada akhirnya akan melemahkan kemiskinan antargenerasi sehingga pembangunan suatu negara secara konsisten bergerak ke arah kebijakan yang lebih menguntungkan.

Menurut Yanti dan Adi (2020), graduasi adalah Kelompok pasien PKH yang telah mencapai usia lanjut dan/atau tidak sanggup lagi menanggung rasa sakit pasien yang baru didiagnosis. Kelompok tersebut tidak akan dapat menerima pinjaman jangka panjang. Tujuan pendidikan bertahap adalah untuk mengurangi munculnya konflik sosial dan mengurangi perilaku sosial yang negatif. Hal ini juga berfungsi untuk memperkuat fase terakhir kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH. Graduasi mandiri diterapkan secara tidak memihak dan lugas. Graduasi

mandiri adalah kepemilikan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang telah membaik dan menjadi lebih mampu, artinya tidak mungkin lagi memperoleh manfaat sosial dari PKH. Graduasi alamiah mengacu pada akhir proses karena kriteria PKH tidak terpenuhi. Graduasi mandiri dapat terjadi karena inisiatif KPM sendiri maupun organisasi lain atau pengaruh media sosial.

Sebagai 30% KPM dapat keluar dari program PKH pada tahun 2021, dalam graduasi sejahtera mandiri atau berakhirnya masa kepesertaan karena merasa tidak lagi dalam posisi menerima bansos PKH. Namun angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional yaitu 17,41%. Graduasi merupakan frasa yang digunakan untuk menggambarkan berakhirnya KPM PKH. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas hidup dan penurunan status ekonomi masyarakat miskin, yang berujung pada berakhirnya masa kepesertaan masyarakat miskin akibat hukum buatan manusia (BPS 2023).

Di Kelurahan Lepo, KPM graduasi mandiri adalah sebanyak lima (5) KPM. KPM kelima menyerukan tingkat pemerintahan yang mandiri; Namun keenam KPM tersebut hanya memiliki beberapa komponen PKH saja, seperti tubuh manusia, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Justru ada lima (5) KPM di Kelurahan lepo-lepo memilih untuk graduasi mandiri. Pada titik ini, sangat menggembirakan untuk diteliti karena proses-proses lain menyulitkan identifikasi komponen-komponen ekonomi atau keadaan. Mengingat hal ini, para peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang "bagaimana program mandiri graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)" dilaksanakan. Selain itu peneliti ingin mengetahui tentang lima (5) KPM PKH yang melaksanakan program mandiri graduasi di wilayah Lepo – Lepo Kecamatan Baruga. Peneliti akan menggunakan teori pengambilan keputusan (Decisions Making, 1950) untuk menganalisis data. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, keputusan adalah suatu proses yang berlangsung secara bertahap dalam suatu sistem, meskipun keputusan tersebut merupakan keputusan pribadi yang menimbulkan masalah pribadi untuk mengidentifikasi alternatif solusi yang potensial guna menyelesaikan masalah.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat Dari Program Keluarga Harapan (Studi Pada Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari)”.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian atau mengumpulkan data dan fakta yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari. Berdasarkan data yang dianalisis oleh peneliti, jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Lepo-Lepo Kecamatan Baruga merupakan salah satu dari sedikit kelompok yang jumlah pesertanya sangat signifikan. Penyebab kegagalan penelitian ini adalah banyaknya masyarakat kurang mampu yang tidak mampu mengikuti PKH yang melakukan graduasi buatan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif merupakan serangkaian prosedur yang berfungsi sebagai metode non-invasif untuk mempelajari objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah terkumpul tanpa memerlukan analisis dan hasilnya dapat digeneralisasikan (Sugiyono, 2014). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini disebut analisis lapangan, yang mengacu pada pendekatan metodis dalam pengumpulan data dan cara metodis untuk mengekstrak informasi yang terkait dengan objek penelitian. Banyaknya data yang digunakan dalam penelitian ini disebut data awal, yang sering dikenal sebagai data pokok atau data yang diperoleh melalui penelitian pendahuluan yang dilakukan di laboratorium. Informasi yang diperoleh berasal dari Kelompok Manfaat Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari. Tiga jenis data yang dikumpulkan adalah observasi, dokumen, dan wawancara. Namun, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model Miles dan Huberman. Tiga tugas utama dalam analisis ini adalah visualisasi data, analisis data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat Dari Program Keluarga Harapan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari

Lambat laun, hal ini menjadi aspek yang lebih penting dan bahkan mungkin menjadi ciri khas jaringan sosial PKH, dan terkadang memengaruhi jaringan sosial lain di dalam pemerintahan. Merujuk Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kelulusan dari KPM PKH, meskipun programnya sendiri sebagian besar masih berjalan. Wisuda terkait dengan peresmian menjadi KPM PKH. Ibu hamil, menyusui, memiliki anggota keluarga balita, orang penyandang disabilitas, dan lanjut usia merupakan kondisi tidak dan atau kurang mampu. Apabila syarat KPM ditentukan secara mandiri secara ekonomi dan/atau tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan sebagai KPM PKH, misalnya tidak termasuk orang tua lanjut usia, anak yang belum bersekolah, dan anggota keluarga yang mengalami cacat jangka panjang, maka KPM secara bertahap akan mengalami kemunduran (Wediawati dan dan Syarif, 2021)

Menurut Lilis Suryati dan Yuniar Avianti (2023), ada beberapa faktor yang berkontribusi dan menghambat pendidikan dalam negeri. Wisuda mandiri meliputi faktor-faktor pendorong melalui pendamping, materi pendampingan, kesempatan usaha, dan kontrol sosial. Pertama, Pendamping Pendamping PKH mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penetapan dan pengukuhan KPM PKH yang bertekad mandiri secara ekonomi dalam rangka menyelenggarakan graduasi mandiri. Berdasarkan bukti yang ada saat ini, faktor pendamping sejauh ini merupakan faktor terpenting dalam mendorong KPM PKH hingga mencapai graduasi buatan manusia. Kelulusan KPM PKH redamannya tergantung seorang pendamping sangat menentukan kegigihan usahanya serta pepekaan, keterampilan, dan semangat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagai pendamping teoritis, seseorang harus memahami dengan tepat apa saja yang dapat dilakukan program PKH sesuai dengan persyaratan dan TUPOKSI yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait. Selain itu, kami menyediakan beberapa buku yang ditulis dengan baik tentang topik-topik umum PKH, seperti kelembagaan, proses bantuan

pengajaran, dan buku-buku lain yang ditulis dengan baik yang dapat diperoleh melalui Bimbingan Teknis (BimTek).

Menurut Gunawan dan Afda (2024), kegiatan pendampingan bermanfaat untuk pertama kalinya. Pertemuan ini dilaksanakan di Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, termasuk menentukan lokasi dan waktu di mana setiap orang yang menerima manfaat harus terlebih dahulu mengidentifikasi pertama mereka berdasarkan data temporal. Setiap awal di tingkat kecamatan memiliki antara 30 hingga 60 peserta (yaitu, tiga kelompok peserta). Jika terdapat lebih dari 15 orang yang tinggal dalam satu desa, maka luas areal yang ditanami mungkin lebih dari satu ekor anak sapi, atau seluruh areal dapat ditanami secara bersamaan. Langkah awal dalam program keluarga harapan adalah pengisian formulir data, memudahkan setiap peserta dalam kelompok untuk berkoordinasi dan berkomunikasi satu dengan yang lain, serta memudahkan kelompok untuk memahami persyaratan untuk dapat mengikuti fasilitas PKH Kesehatan. Kegiatan dalam rencana PKH secara keseluruhan antara lain menjelaskan tujuan program, persyaratannya, syarat-syarat, tingkat bantuan, mekanisme, dan lain-lain, serta menyusun komponen-komponen program (seperti mahasiswa PKH). Di dalamnya juga diperjelas tanggung jawab dan hak orang tua peserta PKH.

Namun, sebelum melakukan graduasi, penerima KPM harus memahami konsep graduasi secara menyeluruh. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan program kesehatan keluarga (PKH) di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan pendekatan wawancara, observasi diam-diam, dan dokumentasi mengenai Pendampingan PKH di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari sebagai objek/lokasi penelitian ini. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi rincian tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan yang dilakukan PKH serta informasi tentang Program Kesejahteraan Sosial yang diberikan kepada penerima manfaat PKH di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari. Berikut ini adalah temuan penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan hasil wawancara tentang pendampingan PKH di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari. Sebelum menjadi Peserta Penerima PKH, ada beberapa langkah yang perlu

dilakukan, antara lain verifikasi, validasi, sosialisasi, pencairan, pembentukan kelompok, dan mutasi data.

Langkah pertama adalah verifikasi. Sementara proses saat ini dilakukan terhadap peserta PKH yang kemungkinan besar miskin, kami juga berkonsultasi dengan pihak desa untuk memastikan bahwa data yang tersedia memang dapat diandalkan, sebanding dengan KK dan KTP. Data ini kemudian dibandingkan dengan data kesejahteraan yang tersedia dari Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari untuk memberikan bantuan yang berarti bagi masyarakat miskin. Mutu data dilakukan setiap tiga bulan karena akan menyederhanakan proses pengelolaan data penerima PKH.

Tahap terakhir pengumpulan data adalah pengumpulan data dari kegiatan peserta terkait penerima manfaat PKH yang berada di wilayah Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tiga bulan dan hasilnya kemudian disampaikan kepada koordinator PKH Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari. Informasi dari laporan itu sendiri mencakup informasi mengenai beberapa komponen program, termasuk yang terkait dengan ibu, anak perempuan, anak sekolah, dan individu lainnya. Hingga saat ini belum ada informasi mengenai penerima PKH yang belum memulai komitmennya. Pelaksanaan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari dapat dikatakan efektif apabila program bantuan yang dimaksud telah menunjukkan rekam jejak keberhasilan yang konsisten dalam menghasilkan pinjaman baru. Dalam penelitian ini, tingkat keberhasilan program pendampingan keluarga ditentukan oleh empat indikator efektivitas program, yaitu: keharmonisan keluarga, sosialisasi, kualitas perawatan, dan kuantitas sumbangan yang sesuai. Untuk menjadi pasien PKH membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat bulan. Menurut saya, pendampingan yang diberikan oleh pendamping sangat baik dan ada manfaatnya meskipun kondisinya sudah buruk. Setiap bulan dilakukan sosialisasi, dan besaran bantuan ditentukan oleh pendidikan yang diberikan kepada anak saya. PKH ini merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada orangtua lanjut usia yang

memiliki anak dan diberikan secara santun, tidak seperti bansos lain yang sifatnya mentah.

Faktor-faktor Yang Memengaruhi Graduasi Mandiri Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Ada beberapa faktor yang berdampak negatif pada ambang batas KPM, yaitu sebagai berikut:

1. Pendamping

Tujuan dari Unit Program Keluarga Harapan (UPPKH) adalah untuk meningkatkan produktivitas pegawai dengan melaksanakan tugas dan kewajiban yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan prestasi kerja pegawai. Memberikan informasi (sosialisasi) kepada pegawai KPM dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas akan membantu kelompok tersebut untuk mempermudah proses pelunasan utang. PKH seluruh peserta awal serta penerimaan. Selain itu, koordinator PKH untuk masyarakat setempat juga memberikan informasi tentang inisiatif PKH Pendamping untuk membantu masyarakat menjadi lebih produktif. Mendorong staf KPM agar masyarakat umum tidak dapat mematuhi program ini karena tidak secara konsisten memberikan dukungan kepada masyarakat umum. Melalui motivasi ini, kami berharap dapat meyakinkan masyarakat asing bahwa bantuan ini tidak berlaku untuk setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pemendekan jam siang hari.

Sosialisasi graduasi pada implementasi teknis graduasi mandiri pada dasarnya sama dengan graduasi alamiah karena sama-sama mempunyai tujuan untuk menambah pemahaman KPM mengenai konsep dari graduasi PKH sekaligus mensosialisasikan isi dari Undang-undang terkait dengan graduasi. Sebagai gambaran, kita harus mencermati kondisi rumah dari waktu ke waktu untuk melihat bagaimana dampak krisis ekonomi terhadapnya. Tidak jarang kemerosotan ini terjadi secara tiba-tiba, namun lebih sering mengakibatkan kerusakan harta benda, menjadi aspek yang sangat penting dalam masyarakat. Posisi pendamping sebagai kaki administratif dan kaki daerah menjadikan pekerjaan mereka sebagai salah satu dari sedikit cara untuk mengomunikasikan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan

masyarakat dan daerah secara efektif. PKH merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh undang-undang kepada masyarakat yang terdampak untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Di Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, kami secara rutin mengirimkan fasilitator ke Rakor untuk membahas masalah PKH. Untuk memfasilitasi koordinasi, kami juga melakukan penilaian dengan menggunakan pendamping desa. Selain itu, mereka dapat bekerja sama untuk membangun masyarakat yang kohesif.

2. Materi Pendamping

Program Keluarga Harapan yang dicanangkan Rachma dan Azkia pada tahun 2022 lalu merupakan upaya pemerintah untuk menaikkan tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat. Diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi pasien. Tujuan dari program PKH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Berdasarkan kriteria dan komponen berdasarkan prinsip untuk menciptakan norma masyarakat, sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat yang benar-benar tidak mampu (tidak mampu memasak, mengasuh anak, membeli susu, dan sebagainya). Terkait dengan tata cara PKH di Desa Jungpasir, menurut Bapak Imron, informasi dari masyarakat yang masuk dalam kategori berpotensi mendapatkan PKH kemudian dikoordinasikan dengan RT dan diteruskan ke pemerintah desa. Setelah itu, data akan dikirim ke kantor PKH untuk dilakukan analisis lebih lanjut, entri data, dan terakhir pengolahan data sesuai dengan komponen penggantian PKH yang dipastikan sudah ada dalam BDT.

3. Kesempatan Usaha

Perbedaan antara input dan output dapat dilihat dari hubungan keduanya. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan pemerintah yang berupa data dan dana yang telah disepakati untuk pelaksanaan program Beni dan Manggu (2020). Fokus utama dari kontribusi ini adalah validasi klaim hewan yang telah diubah menjadi klaim manfaat PKH. Sebaliknya, output dari bab ini berupa peserta proyek yang telah disetujui oleh Komite Sosial. Pembangunan rumah tangga orang miskin dimulai di tingkat desa. Desa proaktif akan melakukan survei dan kunjungan rumah oleh kerabat, dan data yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam aplikasi yang disebut

SIKS-NG (sistem informasi sosial untuk generasi mendatang) berdasarkan hasil survei desa. Salah satu pernyataan KPM PKH Komponen usaha adalah jumlah uang yang diterima tidak sebesar yang seharusnya karena adanya fluktuasi jumlah uang yang diterima. Menurut Pendamping PKH, PKH mengalami perubahan kebijakan karena adanya perkembangan baru di Menteri Sosial, termasuk penyesuaian besaran bantuan penerima. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai uang kertas di KPM saat ini, yang disebabkan oleh kebocoran data, di mana semua data PKH harus direkonsiliasi dengan semua data yang bocor.

4. Kontrol Sosial

Menurut Budiarti dan Pramono (2022), PKH merupakan kelompok penerima layanan kesehatan gratis dari Askeskin dan program lain yang tersedia bagi anggota masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, kartu PKH dapat digunakan sebagai alat identitas untuk memverifikasi dokumen yang tampak mencurigakan. Komponen pendidikan dalam PKH dirancang untuk meningkatkan keikutsertaan siswa dalam mata kuliah wajib selama dua tahun dan mengurangi jam kerja siswa yang sangat rendah. Salah satu langkah awal dalam pelaksanaan PKH adalah pengendalian dan pentahapan lokasi. Prosedur ini dilakukan sebelum program dimulai. Terkait hal tersebut, Dinas Sosial dan Pemda saling berkomunikasi secara erat, khususnya Wali Kota Kendari yang berkoordinasi erat dengan Dinas Sosial. Pemantauan dan monitoring lokasi ini dilakukan secara real time dengan menggunakan data yang bersumber dari data sensus, kecamatan, warga yang kurang mampu sebagai penerima PKH, serta beberapa sumber lainnya.

Tahap pengendalian dan penentuan lokasi pada proses PKH ini berlandaskan pada data dasar Program Perlindungan Sosial TNP2K yang belum diolah yang bersumber dari hasil Program Perlindungan Sosial BPS. Setelah melalui tahap pemilihan lokasi, selanjutnya adalah proses finalisasi. Proses pertama adalah kegiatan PKH pada ambang batas KPM, yaitu Kelurahan disesuaikan dengan KPM pada siklus pertama. Penugasan ini diawasi oleh UPPKH Kabupaten/Kota, termasuk penentuan lokasi dan waktu penyelesaian penugasan oleh masing-masing KPM.

Menurut Edi Suharto (2009), strategi kerja sosial digunakan dalam strategi kemiskinan. Pekerjaan sosial profesional merupakan disiplin akademis yang berfokus pada upaya membantu orang agar mereka dapat membantu diri mereka sendiri. Dalam proses menjadi penting, pekerjaan sosial didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang memperkuat konsep fungsi sosial. Sesuai teori fungsi sosial, keterampilan sosial orang miskin difokuskan pada peningkatan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas sesuai dengan status mereka. Karena gaya hidup dan status merupakan konsep yang multifaset dan dinamis, intervensi kerja sosial mungkin tidak selalu membuat perbedaan dalam lingkungan dan keadaan yang dihadapi oleh mereka yang terdampak.

Dalam melaksanakan PKH, Utari dan Dwiniati (2024) sayangnya tidak memiliki alur atau tahapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa PKH dapat berjalan dengan sukses. Namun, tujuannya adalah untuk menentukan jumlah KPM yang terdata oleh Direktur Kesejahteraan Sosial Komite Masyarakat. Kedua, tujuan dari fase awal dan validasi adalah untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait PKH kepada KPM peserta yang terindikasi PKH. Langkah ketiga adalah fase KPM PKH, yang didasarkan pada validasi kriteria kepatuhan fase PKH yang ditentukan dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan ini terdiri dari uang secara bertahap dalam satu tahun yaitu penyaluran buku tabungan, penarikan dana dengan layanan bank atau ATM. Umumnya pertukaran data dilakukan oleh pendamping PKH dengan tujuan untuk memahami tren KPM saat ini dan memastikan seluruh KPM PKH terdaftar dan mendapatkan layanan dari fasilitas pendanaan. Pada prinsipnya pendampingan dilakukan melalui pendamping PKH ketika tercapai penyelesaian melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pada akhir proses transformasi, KPM PKH menggunakan prosedur sertifikasi ulang (ulang data) untuk menentukan status pada akhir proses transformasi, yaitu peralihan dan perubahan bertahap akibat hadirnya PKH sehingga KPM mengalami perubahan. terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan Graduasi Mandiri Keluarga Harapan di Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari didasarkan pada beberapa indikator, antara lain: derajat mobilitas, kemampuan membeli komoditas skala kecil dan besar, dominasi terhadap kelompok, keadaan hukum dan politik, derajat keterlibatan dalam bentuk kampanye dan perlindungan, sumbangan ekonomi, dan dampak negatif terhadap kelompok. Sebaliknya, korelasi positif terlihat antara beberapa faktor seperti kontrol sosial, ketajaman bisnis, depresi material, dan pertumbuhan individu dan Keluarga Penerima Manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni, S., & Manggu, B. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 162-170.
- Budiarti, E., & Pramono, T. D. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmiah Ultras Brebes*, 5(2).
- Gunawan, R., Hartiadi, M., Ibrahim, A. M., & Afda, V. (2024). Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mendorong Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat. *Karimah Tauhid*, 3(9), 9969-9978.
- Hari Harjanto Setiawan, 2019. Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (Iks) Di Indonesia *Defining Social Welfare Index (Swi) In Indonesia*
- Intan Putri Pratiwi, 2019. Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting*
- Khoiriyah, N. (2019). Graduasi Mandiri: Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (Kpm) Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Pati. *KOMUNITAS*, 10(2), 143-156.
- Kemensos. (2009) UU. No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kemensos.
- Kementerian Sosial. 2020. Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergi Dan Terpadu.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor146/HUK/2013.
- Kusumaningrung, R., F. Nugroho dan Alfrojems. 2020. Faktor - Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi dari Program Keluarga Harapan. *Jurnal PKS* : 19 (3), 265-275.
- Lilis Suryati S, L. S. S., Rangga, K. K., Yaktiworo Indriyani, Y. I., Wuryaningsih Dwi Sayekti, W. D. S., & Yuniar Avianti, Y. A. (2023). Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Graduasi Sejahtera Mandiri Penerima Program

- Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Tengah. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development*, 5(2), 112-122.
- Meri, A. (2023). *Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (Kpm Pkh) Dalam Upaya Meningkatkan Graduasi Mandiri* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Midgley, James. (1995). *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan diterjemahkan oleh Fathrulsyah*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Nainggolan, N. P., & Heryenzus. (2018, April). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Membeli Rumah Di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 19, 45 - 54.
- Nur Khoiriyah. (2019). Graduasi Mandiri: Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (Kpm) Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Pati.
- Putri Anita Rahman, 2019. Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi
- Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(2), 93-104.
- Utari, D. S., Rinah, S. A., Sigalingging, D. N., & Dwiniati, D. (2024). Dampak Kebijakan Labelisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Manfaat Bantuan PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 211-224.
- Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Sri Sutjiatmi dan Farida Umaroh. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik - Pemerintahan) Vol. 2 (2)*.
- Tirani, O. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Poso. *Journal of Governance Volume 5, Issue 1*
- Wedawati, B., Jamal, J., Machpuddin, A., Ratnawati, R. T. S., & Syarif, A. (2021). Efektifitas Skema Graduasi Program Keluarga Harapan: Studi Pada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 57-68.
- Yanti, D. F., & Adi, I. R. (2020). Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Cianjur Dalam Kerangka Result-Based Management. *Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 147-163